

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anisah, S., 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Harahap, M.Y, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan ke-7, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, S., 2008, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Muljadi, K. dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Edisi Pertama, Cetakan ke 2, Prenada Media Group, Jakarta.

Mulyadi, L., 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, P.T. Alumni, Jakarta.

Nainggolan, B., 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Edisi Pertama, Cetakan 1, PT ALUMNI, Bandung.

Poesoko, H., 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Edisi Revisi*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta.

Pramono, N. dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila – Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Edisi 1, ANDI, Yogyakarta.

Sastrawidjaja, M.S., 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, Edisi Pertama, Cetakan ke 2, P.T. ALUMNI, Bandung.

Sjahdeini, S.R., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesembilanbelas, PT.Intermasa, Jakarta.

Subhan, M.H., 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta,

Sumardjono, M.SW., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, A., 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanta, T., 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan – Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, A. dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Cetakan Kedua, PT RadjaGranfindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal, Makalah Seminar dan Pelatihan, Hasil Penelitian/Tugas Akhir, Sumber Internet

Deni, Muhammad, 2015, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis Atas Debitor Utama Yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Permohonan Pihak Ketiga Dalam Hal Perjanjian Kredit Disertai Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali MA - RI Nomor 111PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 *jo* Putusan Kasasi MA-RI Nomor 45K/Pdt.Sus/2013 *jo* Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst.)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pakel, Yane, 2016, “Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan Dan Pemberian Harta Pailit”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pandiangan, Roni, 2008, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 033/K/N/2006 Perkara Kepailitan : PT.Bank Mayora melawan PT Beruangmas Perkasa, dan PT. Oxedon Enterprise Limited”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Purba, J.J. “Hukum Peradilan Niaga dan Kepailitan”, disampaikan pada *Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan VIII*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2-13 Juli, 2018.

Susanti, 2019, “Kepailitan Penanggung Utang (*Borg*) Atas Wanprestasinya Debitor Yang Ditanggung”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Tejaningsih, Titik, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wijayanta, T. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Bulan Juni, 2010.

_____, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Bulan Februari, 2010.

_____, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Bulan Mei, 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) *Staatsblad* 1847-23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3632).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253).

4. Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Tanggal 18 Juli 2017, Perihal Permohonan Keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi antara PT Bank Maybank Indonesia, Tbk terhadap TIM KURATOR PT DIS (dalam pailit) dan R.S (dalam pailit).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, Tanggal 19 Januari 2015 Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Bank Internasional Indonesia yang saat ini menjadi PT Bank Maybank Indonesia terhadap PT. DIS dan R.S.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, Tanggal 04 Maret 2015 Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam

Penolakan atas Rencana Perdamaian yang diajukan PT Bank Internasional Indonesia yang saat ini menjadi PT Bank Maybank Indonesia terhadap PT. DIS dan R.S.

5. Wawancara

Chryssantus Kastowo, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Bank selaku Kreditor, *Wawancara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 08 Oktober.

Titik Tejaningsih, 2019, Kedudukan Kreditor dalam Penyelesaian/Pemberesan Harta Pailit (*Boedel*), *Wawancara*, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 24 September.

Susanti, 2020, Problematika dalam Pemasangan Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan, *Wawancara*, Yogyakarta, 21 Januari.